

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Krimea sendiri merupakan wilayah otonom yang mayoritas penduduknya beretnis Rusia. Dengan luas sekitar 26.100 km<sup>2</sup>, Semenanjung Krimea terletak di bagian selatan Ukraina. Wilayah ini hampir seluruhnya dikelilingi oleh Laut Hitam dan Laut Azov. Pada abad ke-13, Krimea ditaklukkan oleh Golden Horde Mongol lalu diislamisasi pada awal abad ke-14 dan menjadi khanat Krimea pada abad ke-15. Pada akhir abad ke-18, Krimea menjadi bagian dari Uni Soviet sebelum kembali menjadi milik Ukraina pada tahun 1954 sampai tahun 2014. Saat ini, mayoritas penduduk di Krimea terbagi menjadi dua etnis, yaitu Ukraina dan Tatar. Krimea memiliki keunggulan dalam pariwisata dan pertanian, namun, sangat bergantung pada Ukraina untuk pasokan listrik, air, dan lainnya. Terdapat kandungan minyak dan gas yang besar di lepas pantai Krimea dan sebagian belum tereksplorasi (Oktaviano, 2015).

Krimea adalah negara otonom dengan parlemennya sendiri. Tetapi secara fisik dan politik Krimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina. Sejarah mencatat, Krimea pernah menjadi bagian dari Uni Soviet sebelum pemimpin Uni Soviet pada saat itu, Nikita Khrushchev menghadiahkan Krimea sebagai hadiah Ukraina. Namun, karena pada tahun 1991, Ukraina telah melepaskan diri dari Uni Soviet maka Krimea dengan sendirinya menjadi bagian dari Ukraina. Dalam hal ini, Krimea tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Sedangkan, status Krimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina (Devega, 2014).

Konflik yang terjadi antara kedua negara ini diawali dengan perbedaan pandangan politik. Ukraina memiliki keinginan untuk mandiri yang menjadi landasan Ukraina ke luar dari anggota non-blok dan ingin bergabung dalam Uni Eropa yang sifatnya liberal. Keinginan Ukraina untuk bergabung dalam Uni Eropa tentu memberikan dampak positif bagi Uni Eropa. Namun, hal ini berbanding terbalik bagi Rusia, bergabungnya Ukraina ke dalam Uni Eropa mengancam Rusia dalam segi keamanan, ekonomi, politik dan ideologi. Pada masa pemerintahan Presiden keempat Ukraina, Viktor Yanukovych, terjadi pembatalan perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Ukraina dan penerimaan kesepakatan Kerjasama antara Ukraina-Rusia. Hal ini menyebabkan terjadinya demo dan kerusuhan yang cukup besar sehingga menyebabkan Yanukovych mundur dari kursi kepresidenannya. Setelah mundurnya Yanukovych, campur tangan Rusia semakin terlihat. Rusia mengintervensi Krimea untuk melakukan referendum untuk merdeka dari Ukraina (Mukhlis, Konflik Ukraina dan Rusia Terkait Masalah Status Krimea, 2016).

Akibat dari intervensi Rusia ini, Ukraina melaporkan masalah ini kepada PBB. Lalu, PBB mengadakan rapat untuk menentukan apakah Krimea dapat bergabung dengan Rusia secara legal. Selanjutnya, diadakanlah voting dengan hasil tiga negara yang memiliki hak veto, yaitu Amerika, Inggris dan Prancis memilih untuk tidak setuju jika Krimea bergabung dengan Rusia, sedangkan Rusia menggunakan hak vetonya dengan alasan penggabungan ini merupakan permintaan dari rakyat Krimea sendiri. Sedangkan Tiongkok memilih untuk abstain (Mukhlis, Konflik Ukraina dan Rusia Terkait Masalah Status Krimea, 2016).

Dampak dari kejadian aneksasi Rusia terhadap Krimea pada tahun 2014 memunculkan respons internasional yang signifikan. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan sejumlah negara Barat, serta menimbulkan sanksi ekonomi yang tidak menguntungkan bagi Rusia. Secara politik, aksi aneksasi ini telah merusak kerjasama

internasional dan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan di Eropa Timur seperti krisis energi akibat Rusia memblokir gas dan minyak. Sementara itu, pada wilayah di dalam Krimea sendiri, sebagian besar penduduk yang beretnis Rusia mendukung aneksasi tersebut, walaupun ada sebagian yang lain menolak tindakan tersebut.

Aneksasi Krimea merupakan sebuah proses pengambilan wilayah Semenanjung Krimea dengan paksa yang dilakukan oleh Rusia sejak 18 Maret sampai 21 Maret 2014. Lalu, Rusia memerintah Krimea sebagai Republik Krimea dan kota Federal Sevastopol sejak 21 Maret 2014. Penggabungan ini mencapai puncaknya disebabkan oleh intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia di Republik Otonom Krimea dan Sevastopol pada Maret 2014. Sebelum ini, kedua wilayah ini dimiliki Ukraina. Sejak tahun 2014, Rusia telah menganeksasi Semenanjung Krimea (Arjanto, 2022)

Alasan mengapa Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea pada tahun 2014 adalah karena adanya kepentingan Rusia dalam krisis domestik di wilayah itu. Hal ini akibat adanya ancaman terhadap pengaruh politik dan keamanan Rusia dari ekspansi politik dan militer barat ke Kawasan Laut Hitam. Ekspansi ini dilakukan oleh tiga aktor internasional yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), Uni Eropa (UE), dan Amerika Serikat. Selain ekspansi militer yang otomatis diikuti oleh ekspansi politik NATO, Uni Eropa juga memperluas keanggotaannya ke arah timur Eropa, termasuk ke wilayah Laut Hitam (Oktaviano, 2015).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana situasi dan dampak aneksasi oleh Rusia terhadap Krimea”.

## **C. LANDASAN TEORI**

### **1. Aneksasi**

Kata "aneksasi" berasal dari kata "ad", yang berarti "ke", dan "nexus", yang berarti "bergabung." Aneksasi, juga dikenal sebagai subjugasi, adalah suatu bentuk pemilikan tanah dengan kekerasan. Singkatnya, aneksasi adalah upaya untuk mendapatkan tanah dalam dua situasi. Pertama, negara yang akan dianeksasi telah ditaklukan oleh negara yang menganknesasi; penaklukan biasanya dilakukan dengan kekerasan, seperti perang dan invasi militer. Kedua, ketika negara mengumumkan keinginan untuk menganeksasi wilayah tersebut, wilayah tersebut benar-benar berada di bawah negara penganeksasi (Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, 1996).

Sebagai contoh, invasi Israel atas wilayah Sinai Mesir selama perang enam hari di Timur Tengah. Kemudian untuk contoh dalam penjelasan kedua adalah aneksasi Korea oleh Jepang pada tahun 1910 yang terjadi setelah Jepang menguasai Korea selama beberapa tahun. Dalam kasus ini, untuk memulai perolehan wilayah tersebut diperlukan suatu pernyataan formal tentang keinginan untuk melakukan penganeksasian, yang biasanya disampaikan dalam bentuk nota atau nota-nota kepada negara yang berkepentingan (Yusuf, 2020).

Aneksasi adalah suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang dipaksakan, dengan dua bentuk keadaan (Yusuf, 2020):

- a) Apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak;
- b) Apabila wilayah yang dianeksasi benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi saat negara tersebut mengumumkan keinginan untuk menganeksasi.

Hak tidak diperoleh hanya dengan penaklukan wilayah seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, pernyataan formal tentang keinginan untuk menganeksasi harus dibuat, biasanya dalam bentuk nota yang dikirim ke semua negara yang berkepentingan. Oleh karena itu, negara penakluk tidak dapat memperoleh kedaulatan atas wilayah yang ditaklukkannya kecuali negara tersebut secara tegas menyatakan bahwa mereka ingin mengambilnya. Negara-negara tidak boleh menerima aneksasi yang dihasilkan dari agresi kasar oleh satu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) (Yusuf, 2020).

Pada tahun 2014, permasalahan aneksasi Rusia yang terjadi di Krimea menggunakan serangkaian tindakan yang meliputi intervensi militer dan campur tangan politik. Intervensi yang dilakukan yakni dengan mengirimkan pasukan militer untuk mengendalikan wilayah darat dan perbatasan Krimea. Selanjutnya dari segi politik Rusia memanfaatkan politisi yang pro terhadap Rusia di Krimea dan membuat referendum yang diselenggarakan di Krimea namun bagi banyak negara hal tersebut adalah ilegal. Referendum tersebut disahkan serta ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin dan Perdana Menteri Krimea yang pro-Rusia Sergei Aksyonov yang menandai kesepakatan penerimaan Republik Krimea masuk ke dalam Federasi Rusia (Thomas, 2015).

Aneksasi tentunya sangat berdampak pada banyak aspek. Ekonomi dan politik menjadi aspek yang dampaknya cukup signifikan terhadap negara yang terlibat. Krisis di Ukraina memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat besar. Krisis ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian tentang masa depan negara yang mana membuat pemegang ekonomi lumpuh selama berbulan-bulan dan terganggunya keputusan pelaku ekonomi. Setelah aneksasi Krimea, prioritas jangka pendeknya adalah mempertahankan kestabilan politik dan mencegah siklus peristiwa baru. Hal ini termasuk eskalasi militer yang memerlukan biaya yang sangat banyak

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah menjaga integritas teritorial sebanyak mungkin, jangka pendek yang paling ekonomis adalah untuk menghindari kebangkrutan negara. Ukraina tidak dapat lagi mengandalkan pinjaman Rusia, diskon harga gas atau negosiasi hutang dengan Gasprom. Uni Eropa dan Amerika Serikat bermain peran yang kuat dalam memastikan stabilitas ekonomi untuk mencegah kerusuhan sosial dan ketegangan politik (Blanco, Mtshiselwa, Elmeligy, & Santos, 2014).

Salah satu contoh aneksasi adalah konflik antara Palestina dan Israel telah membuka babak baru. Israel secara mengejutkan dinubuatkan bertujuan untuk mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat pada 1 Juli 2020. Alasan pihak Israel menganeksasi Palestina adalah kesepakatan abadi (*deal of the century*) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Donald Trump sebagai negara adikuasa. Karena itu, pihak Israel terus membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat. Inilah yang diyakini sebagian besar orang Yahudi Israel di wilayah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Keyakinan ini berhasil eksodus massal orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina setelah Perang Arab-Israel tahun 1967. Mereka secara perlahan mengusir orang-orang Palestina dan secara bertahap mulai membangun pemukiman. Selama beberapa dekade, permukiman Yahudi terus tumbuh dan berkembang karena keamanan, akses ke listrik, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya terjamin. pemerintah Israel (Kaslam, 2021).

Tindakan yang dilakukan oleh Rusia mendapat kecaman yang luas di skala internasional, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *hard power* dan argumen *soft power* tidak selalu mencapai tujuan diplomatik yang diinginkan. Berangkat dari hal tersebut, Rusia mendapatkan sanksi ekonomi berupa embargo yang mengalami perpanjangan sebanyak tiga kali. Durasi Rusia menerima embargo dari Uni Eropa adalah 30 bulan sampai pada 31 Januari 2017. Menurut Siretar (2017) Sanksi ekonomi yang diberlakukan berupa pembekuan aset dengan masa berlaku yang diperpanjang sebanyak

dua kali dari semula sehingga total waktu pembekuan aset selama 34 bulan. Hal ini berlaku juga dengan pelarangan visa dan pembatasan perjalanan.

#### **D. HIPOTESIS**

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Terjadi eskalasi konflik antara Rusia-Ukraina terkait status Krimea.
2. Aneksasi memicu permasalahan ekonomi, ideologi, sosial, politik, dan hak asasi manusia di Krimea.

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam kaitannya dengan ilmu hubungan internasional, tujuan kegiatan analisis situasi Krimea pasca aneksasi oleh Rusia adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konflik yang terjadi di Krimea yang melibatkan Rusia dan Ukraina.
2. Untuk menganalisis dampak aneksasi oleh Rusia.
3. Untuk mencari dan memahami reaksi dunia internasional terhadap konflik di Krimea.

#### **F. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bidang pendidikan, ada dua jenis metode penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti: kualitatif dan kuantitatif. Penulis penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang menurut Sugiyono didefinisikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filsafat post positivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, menggunakan peneliti sebagai alat utama (Sugiyono, 2004).

Sedangkan Krik dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang tersebut (Sudarto, 1995). Secara umum,

penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut masyarakat sendiri (Suprayogo, 2001).

Metode penelitian penulisan ini adalah kualitatif dengan mengambil data dari perpustakaan, jurnal dan berita. Adapun kualitatif akan digunakan dalam melihat bagaimana dampak aneksasi yang dilakukan oleh Rusia atas Semenanjung Krimea.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penelitian ini terdiri dari:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Dinamika situasi Krimea pasca aneksasi oleh Rusia.

Pada bab 2 ini, penulis akan menjelaskan mengenai proses yang terjadi sebelum dan sesudah proses aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea. Bab ini akan lebih berfokus kepada hubungan antara kedua negaraini yang nantinya akan dijelaskan secara terperinci dan terfokuskan.

Bab III: Dampak Aneksasi dan upaya Ukraina mempertahankan Krimea.

Pada bab 3, penulis akan menjabarkan dampak dan upaya Ukraina dalam mempertahankan Krimea.

Bab IV: Kesimpulan